



# JURNAL BASICEDU

Volume 7 Nomor 6 Tahun 2023 Halaman 4057 - 4064

Research & Learning in Elementary Education

<https://jbasic.org/index.php/basicedu>



## Analisis Pembiayaan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak menurut Pemikiran Karl Marx

Ulmadevi<sup>1✉</sup>, Silfia Hanani<sup>2</sup>, Junaidi<sup>3</sup>, Abdillah El-Zakir<sup>4</sup>, Abdurrasyid Ridha<sup>5</sup>

Universitas Islam Negeri Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi<sup>1,2,3,4,5</sup>

E-mail: [Uulsehlah27@gmail.com](mailto:Uulsehlah27@gmail.com)<sup>1</sup>, [silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id](mailto:silfiahnanani@uinbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>, [junaidialhadi@gmail.com](mailto:junaidialhadi@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[a.el.zakir@gmail.com](mailto:a.el.zakir@gmail.com)<sup>4</sup>, [abrarridha96@gmail.com](mailto:abrarridha96@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pembiayaan pendidikan di Taman Kanak-kanak diselenggarakan dengan teknik yang sama dengan jenjang pendidikan lainnya, yakni dengan sumber dana BOP, mulai menerapkan penatausahaan dan pelaporan secara online melalui aplikasi ARKAS tahun 2024. Namun demikian, terdapat beberapa tantangan terkait pengaplikasian ini, berupa keterbatasan sumber daya manusia baik yang ahli di bidang pembiayaan itu sendiri dan yang mampu menggunakan teknologi penatausahaan keuangan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model pembiayaan pendidikan di taman kanak-kanak dari sudut pandang sosiologi pendidikan. Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan analisis data yang dilakukan dengan mereduksi, menyajikan dan verifikasi data, kemudian hal ini dikaitkan dengan pemikiran Marx sebagai salah satu filsuf bidang sosiologi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dimana model pembiayaan pendidikan di taman kanak-kanak menggunakan model landasan perencanaan dan model dana bantuan murni. Analisis pemikiran Marx menunjukkan jika pembiayaan yang ada saat ini belum menutupi secara keseluruhan biaya pendidikan yang ada, sehingga perlu adanya sokongan dana dari pihak lain (orang tua) yang akhirnya menimbulkan kelas lain di lembaga pendidikan. Dimana orang tua merasa berhak mengatur pendidikan sebagaimana keinginan mereka sebab mereka berada di posisi pemilik dana (Borjuis).

**Kata Kunci:** Analisis Pembiayaan, Taman Kanak-kanak, Karl Marx.

### Abstract

Education financing in kindergarten is organized using the same techniques as other levels of education, namely with BOP funding sources, starting to implement online administration and reporting through the ARKAS application in 2024. However, there are several challenges related to this application, in the form of limited human resources both experts in the field of financing itself and those who are able to use the financial administration technology. This research aims to analyze the education financing model in kindergarten from the point of view of the sociology of education. The research conducted is descriptive qualitative research with data collection methods through interview activities and data analysis carried out by reducing, presenting and verifying data, then this is associated with Marx's thoughts as one of the philosophers in the field of sociology. The results obtained from this study, where the education financing model in kindergarten uses a planning foundation model and a pure aid fund model. The analysis of Marx's thought shows that the current financing has not covered the entire cost of education, so it is necessary to support funds from other parties (parents) which ultimately creates another class in educational institutions. Where parents feel entitled to organize education as they wish because they are in the position of the owner of funds (Bourgeois).

**Kata Kunci:** Financing Analysis, Kindergarten, Karl Marx.

Copyright (c) 2023 Ulmadevi, Silfia Hanani, Junaidi, Abdillah El-Zakir, Abdurrasyid Ridha

✉ Corresponding author :

Email : [ulmadevi79@guru.paud.belajar.id](mailto:ulmadevi79@guru.paud.belajar.id)

DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6719>

ISSN 2580-3735 (Media Cetak)

ISSN 2580-1147 (Media Online)

Jurnal Basicedu Vol 7 No 6 Tahun 2023  
p-ISSN 2580-3735 e-ISSN 2580-1147

## PENDAHULUAN

Sebuah lembaga pendidikan yang berhasil mencapai tujuan-tujuan pendidikan yang dituangkan dalam UUD 1945 dan UU Sistem Pendidikan Nasional di mana tujuan pendidikan lembaganya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari perencanaan pendidikan, termasuk di dalamnya perihal pengelolaan pembiayaan pendidikan. Dalam konteks yang luas, perencanaan pendidikan dan dukungan keuangan yang tinggi adalah saling terkait dan memengaruhi satu sama lain. Kualitas pendidikan akan sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Semakin mahal biaya pendidikan yang digunakan, semakin baik layanan pendidikan yang dapat diberikan. Hal ini juga akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan pencapaian belajar yang tinggi. Mewujudkan mutu pendidikan yang baik bisa menjadi sulit jika tidak ada dukungan dari biaya pendidikan (Huda et al., 2022).

Pembiayaan dalam dunia pendidikan adalah hal yang kompleks. Seiring dengan kemajuan negara, tanggung jawab penuh atas pembiayaan pendidikan menjadi tugas negara. Negara berkembang, berbeda dengan negara maju, mengalihkan anggaran daerahnya untuk fokus pada pembangunan pendidikan. Mereka melakukannya dengan menggunakan beragam metode pembiayaan untuk mendukung pembangunan pendidikan di negaranya. Sama halnya dengan Pasal 49 ayat 1, yang menyatakan bahwa dana pendidikan harus dialokasikan minimal sebesar 20 persen dari APBN dan 20 persen dari APBD. Dalam mewujudkan kebijakan tersebut, diperlukan kesungguhan dari para elite politik dan pelaku pendidikan untuk mengembangkan sistem pendidikan sehingga lembaga mampu dijadikan penggerak bagi kemajuan daerahnya. Kenyataannya sampai sekarang masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan amanat undang-undang tersebut, dan intitusi pendidikan berjalan apa adanya (Oktrigana Wirian et al., 2022).

Taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan formal untuk anak usia dini tidak jauh berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya. Untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran membutuhkan perencanaan pembiayaan yang baik agar pelaksanaan dan pelaporan keuangan berjalan dengan baik. Penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh (Perdana, 2020) dengan judul ‘Analisis Biaya Satuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Holistik Integratif ‘ menganalisis besaran dana bantuan operasional yang diperoleh oleh lembaga Taman kanak-kanak yang berkesimpulan terdapat perbedaan besaran dana antara daerah barat dan daerah timur. Penelitian lainnya oleh (Situmeang et al., 2022) berjudul ‘Manajemen Keuangan Sekolah Taman Kanak Kanak Kalam Kudus Sibolga 2022/2023’ dengan hasil bahwa sumber pembiayaan sekolah berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, donatur dan wali murid. Adapun perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya berupa analisis dari sudut pandang sosiologi tentang sumber dan model pembiayaan yang dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Solihin, 2015) yang berjudul ‘KAPITALISME PENDIDIKAN (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa)’ menyatakan kritik masyarakat terhadap pendidikan dimana pendidikan di sekolah dinilai tidak mampu menghadapi tuntutan pembangunan yang mengharapakan individu memiliki kreativitas dan ketangguhan karakter. Sekolah dianggap sebagai sumber masalah sosial karena sering diperlakukan sebagai entitas bisnis yang mahal, eksklusif, dan bersifat diskriminatif. Kritik-kritik seperti ini menganggap sekolah sebagai panggung kontes dan berbagai gugatan lainnya terus disuarakan terhadap peran sekolah. Itulah alasan pentingnya analisis pembiayaan pendidikan menurut pandangan Marx adalah untuk memahami bagaimana sistem kapitalis dapat memengaruhi akses, isi, dan hasil dari pendidikan. Analisis ini dapat membantu menyoroti potensi ketidaksetaraan serta potensi masalah- masalah sosial yang akan muncul dalam konteks pendidikan yang didasarkan pada logika kapitalis.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan berupa penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui kegiatan wawancara dan analisis data yang dilakukan dengan mereduksi, menyajikan dan verifikasi data. Yang menjadi objek penelitian adalah lembaga taman kanak-kanak di Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok. Responden wawancara adalah perwakilan dari operator sekolah, bendahara sekolah serta TFM Kecamatan yang bertugas memberikan panduan dalam penata usahaan laporan keuangan. Untuk keabsahan data ini dilakukan dengan teknik triangulasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pendidikan hingga kini tetap dianggap sebagai sarana utama dalam mengembangkan potensi manusia. - Pengembangan ini akan memiliki nilai yang tinggi apabila mendukung sikap, wawasan, kemampuan, keahlian, dan keterampilan yang sebagaimana yang dibutuhkan oleh masyarakat atau dunia kerja dalam berbagai bidang dan sektor pembangunan. Pengembangan nilai-nilai SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan di tingkat dasar maupun tinggi (Musthafa, 2017).

Perencanaan adalah sebuah proses yang melibatkan persiapan rangkaian keputusan guna mengambil tindakan di masa depan dengan tujuan mencapai hasil yang optimal menggunakan sumber daya yang ada. Dokumen yang berisi langkah-langkah yang harus diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menentukan urutan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembiayaan pendidikan sebagai sebuah proses memformulasikan sumber dana yang ada untuk menjalankan operasional pendidikan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan. (Wandra & Hadiyanto, 2021) Dalam perencanaan pembiayaan, kita melakukan proses untuk mempersiapkan sejumlah biaya guna menentukan tindakan di masa depan agar dapat meraih hasil yang diinginkan. Dalam perencanaan pembiayaan, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah tindakan yang harus dilakukan dan serta sumber-sumber dana yang diperlukan (Shunhaji et al., 2020).

Pembiayaan pendidikan sendiri mempunyai sejumlah model pembiayaan yang penting untuk dipahami bagi tenaga pengelola pendidikan. Dengan demikian bisa dijadikan landasan oleh tenaga pengelola pendidikan dalam menjalankan kegiatannya. Model pembiayaan yang dipilih dapat menjadi acuan arah dari kebijakan yang diputuskan oleh pengelola pendidikan. Bijak dalam memilih model juga bijak dalam mengambil keputusan, serta menentukan langkah-langkah pengembangan pendidikan selanjutnya. Terdapat berbagai macam model pembiayaan di seluruh dunia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Ada negara yang memang menjadi penanggung jawab penuh terhadap pembiayaan pendidikan, dan ada juga negara yang mengikut sertakan masyarakat dalam pembiayaan pendidikan. Intinya model ini akan menentukan arah pengembangan institusi pendidikan (Oktrigana Wirian et al., 2022).

Dalam konteks mutu pendidikan yang diukur melalui masukan, proses dan keluaran. Maka pembiayaan menduduki posisi yang sama pentingnya dengan aspek lainnya. (Hadi, 2021) Berdasarkan sudut pandang ekonomi bahwa mutu itu berkaitan dengan produk, maka sebuah pembiayaan yang efektif dan efisien tentunya mampu menghasilkan produk yang baik. Terkait dengan tuntutan pendidikan saat ini, tentu banyak hal yang mestinya ikut direncanakan dalam pembiayaan pendidikan. Sebab, ini berkaitan pula dengan sarana dan prasarana pendukung. (Sonia, 2022). Di sisi lain, (Hanani, 2017) menjelaskan rendahnya kualitas sumberdaya manusia juga berakibat terhadap rendahnya inovasi pribadi yang berakibat seseorang enggan keluar dari tradis yang ada. Maka tidak heran pentingnya pendidikan ini perlu mempertimbangkan aspek pembiayaan sebagai perhatian utama dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan.

Pembiayaan pendidikan adalah seluruh biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan berlangsung. Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan pasal 3, menjabarkan jenis biaya satuan pendidikan sebagai berikut: biaya investasi (lahan pendidikan dan selain lahan

pendidikan), biaya operasional (personalia dan nonpersonalia), bantuan biaya pendidikan (beasiswa). Biaya satuan pendidikan merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota, atau penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat (Anwar, 2014) Terkait dengan hal itu, pembiayaan pendidikan di Indonesia saat ini dikenal dengan Bantuan Operasional Satuan ( BOS), tahun 2024 namanya berganti lagi dengan Bantuan Operasional Satuan Pendidikan ( BOSP) dengan besaran yang masih sama dengan tahun sebelumnya namun dengan teknis yang lebih disempurnakan. (Sudarmono et al., 2021) Sebagaimana dijelaskan sebelumnya pembiayaan ini menyangkut biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Bab I Pasal 1 Ayat (10) dan Bab IX Pasal 62 Ayat (1) s/d (5) tentang ruang lingkup standar pembiayaan yang meliputi: a). Gaji pendidik dan tenik beserta serta segala tunjangan yang melekat padanya. B) Barang atau peralatan pendidikan habis pakai, dan c) Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti belanja daya listrik, PDAM, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya (Aflaha et al., 2021).

Terkait dengan pembiayaan tersebut, terdapat beberapa model-model pembiayaan yang bisa diterapkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lembaga. Adapun model-model pembiayaan ini, sesungguhnya membantu terselenggaranya pembiayaan pendidikan yang baik dan akuntabel. Yang pada akhirnya ikut mewujudkan pendidikan yang bermutu sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga. Kenyataan yang ditemukan di lapangan, setiap lembaga memiliki kebutuhan yang tidak sama, bergantung kepada bentuk layanan pendidikan, kondisi fisik dan sumber daya yang ada (Tho'in, 2017) Adapun besaran bantuan operasional pendidikan untuk tingkat TK khususnya yang berada di wilayah barat sebesar RP. 600.000/ siswa untuk satu tahun yang direalisasikan melalui dua tahap.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, beberapa sumber dana pendidikan yang ada di tingkat taman kanak-kanak terdiri dari: a) Pemerintah, sumber dan yang dimaksud berupa bantuan operasional pendidikan. b) Orang tua, sumber dana yang dihimpun dari orang tua bisa berbentuk SPP atau pun dana komite. c) Dana Alokasi Khusus, dana alokasi khusus bersumber dari pemerintah pusat dengan berbagai ketentuan. Biasanya dana ini diperuntukkan untuk pembangunan fisik. d) Dana alokasi pemerintah daerah dan pemerintah desa, dana ini diperoleh dengan mengikuti serangkaian ketentuan. Jumlah dana tidak sama tergantung kepada besaran PAD, luas daerah dan jumlah sekolah yang ada. (Huda et al., 2022) Namun kesemuanya tidak mampu membiayai seluruh kegiatan secara efektif dan efisien.

Pembiayaan pendidikan di taman kanak-kanak digunakan untuk menunjang komponen pembiayaan pendidikan sebagaimana 8 standar pendidikan yang diuraikan dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional yang mencakup standar isi, proses, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, kompetensi lulusan, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan (Damayanti, 2019) Sesuai dengan besaran biaya yang ada, pembiayaan pendidikan tidak sepenuhnya memenuhi ke delapan standar tersebut. Untuk itu, dalam perencanaan pembiayaan ditetapkan aturan setidaknya perencanaan yang dilakukan mencakup minimal tiga dari delapan standar yang ada.

Untuk itu, perencanaan pembiayaan khususnya dana BOP menggunakan RKAS yang masih dioperasikan secara manual. (Situmeang et al., 2022) RKAS ini kemudian di verifikasi dan di sahkan oleh pihak dinas pendidikan sebagai syarat untuk merealisasikan belanja. Terkait hal itu, di Taman Kanak-Kanak tugas ini dibebankan kepada operator sekolah yang dipandang cakap dalam menata laksanakan keuangan meski umumnya operator bukan orang yang ahli di bidang keuangan. Taman Kanak-Kanak kecamatan Bukit sundi sebagai lokasi penelitian telah melakukan perencanaan secara manual ini sejak tahun 2021.

Mulai tahun 2024 mendatang, penatausahaan dan pelaporan keuangan khususnya dan BOSP tingkat taman kanak-kanak disamakan dengan jenjang pendidikan di atasnya ( SD, SMP, SMA, SMK dsb.) Dengan menggunakan aplikasi ARKAS yang terhubung dengan pelaporan keuangan daerah. Tujuan penggunaan

aplikasi ini adalah mempermudah penatausahaan dan pelaporan belanja. Hal ini mewajibkan para penanggung jawab di bidang tersebut untuk mampu menggunakan aplikasi dengan baik. Hal ini menjadi tantangan baru bagi guru taman kanak-kanak. Karena lembaga taman kanak-kanak yang sebagian besar memiliki jumlah murid berjumlah 9-40 orang yang bisa ditangani oleh dua orang guru saja. Maka wajar jika tenaga pendidikan lainnya seperti operator sekolah, bendahara sekolah ataupun bendahara aset dipegang dan dilaksanakan oleh guru. Hal ini sekaligus menambah tugas baru bagi guru yang selain tugas utamanya dalam pembelajaran juga melaksanakan tugas tambahan lainnya.

Umumnya, dalam pembiayaan pendidikan di taman kanak-kanak lebih diutamakan untuk (Lestari et al., 2022) ; a) Honor pendidik dan tenaga kependidikan. b) Biaya operasional rutin seperti listrik dan air, serta c) Alat tulis kantor serta APE. Dengan kata lain, pembiayaan yang ada saat ini hanya untuk memenuhi operasional setiap satuan pendidikan saja. Tidak termasuk biaya investasi dan bantuan biaya pendidikan. Hal ini juga sekaligus sebagai permasalahan pembiayaan yang ada di Indonesia, selain alokasi dana yang tidak mencukupi untuk operasional dan risiko besar penyelewengan dana oleh beberapa oknum. Untuk itu, terdapat beberapa model-model pembiayaan pendidikan diantaranya: 1) Subsidi penuh dari jenjang pendidikan dasar hingga PT ( Perguruan Tinggi); 2) Pendidikan gratis hingga usia tertentu; 3) Pendidikan gratis sampai SMA, dan PT tetap membayar SPP sekalipun masih menerima subsidi; dan 4) Semua tingkatan pendidikan harus membiayai diri sendiri (Mesiono & Roslaeni, 2021).

Melihat apa yang ada di lapangan, pendidikan gratis khususnya di taman kanak-kanak tidak dapat terwujud karena jumlah dana yang ada tidak dapat membiayai seluruh kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. oleh sebab itu, berdasarkan hasil yang diperoleh di lapangan, model pembiayaan pendidikan yang digunakan di taman kanak-kanak diantaranya (FIP, 2010). Pertama, Model Landasan Perencanaan; Model ini menggunakan pertimbangan sumber kekayaan daerah. Di mana pemerintah mempertimbangkan sumber pajak dan pendapatan lain daerah dalam menentukan besaran pembiayaan pendidikan yang akan diberikan. Sehingga daerah yang miskin akan memperoleh pembiayaan lebih banyak dibandingkan daerah yang lebih kaya. Model ini memiliki kelebihan model ini adalah pembiayaan lebih efisien, dan negara mendapatkan pemasukan dari pajak. Sementara kekurangannya, perencanaan tidak maksimal dan cenderung terjadi penyimpangan.(Oktrigana Wirian et al., 2022). Kedua, Model dana bantuan murni; Model ini tidak mempertimbangkan sumber pendapatan daerah, di mana negara memberikan sejumlah dana tanpa mempertimbangkan potensi pajak daerah tersebut. Kelebihannya, pendanaan dapat digunakan secara maksimal. Kekurangannya, negara tidak mendapat pemasukan dari pajak serta rentan terjadinya penyimpangan anggaran.

Fenomena yang terjadi terkait pembiayaan pendidikan sebagaimana yang diuraikan diatas dikenal dengan istilah kenyataan sosial.(Dharma, 2018). Menurut Dharma aktifitas individu dipengaruhi oleh dua hal, kenyataan objektif dan subjektif. Kenyataan sosial objektif adalah pemahaman individu atas lingkungan sosial dimana ia tumbuh dan berkembang, sementara subjektif adalah pemahamannya akan dirinya sendiri.. Kenyataan sosial yang ditunjukkan berupa reaksi atas kedua pemahaman tersebut. Dimana lembaga pendidikan memahami mereka adalah bagian dari sebuah sistem yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan, di samping itu pembiayaan pendidikan yang ada secara idealnya mestilah memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Ditinjau dari pemikiran tokoh Sosiologi pendidikan Karl Marx, dimana ia menyatakan terdapat ketergantungan politik terhadap pendidikan sebagaimana hal yang serupa terhadap ekonomi dan aspek lainnya. (Umanailo, 2019) Sebab sebagai pemegang tampuk pemerintahan semestinya negara bertanggung jawab terhadap pendidikan warga negaranya. Oleh karena itu penting adanya bentuk pemerintahan yang mendukung kebijakan pendidikan. Jika dikaitkan dengan model pembiayaan yang ada, akan semakin jelas tampak hubungan antara politik dengan pendidikan. Dimana setiap model melibatkan pemerintah dalam menentukan kebijakannya.

Marx membagi masyarakat menjadi dua golongan, yakni borjuis dan proletar (Kambali, 2020) Jika pada masa sebelumnya borjuis diartikan sebagai pemilik modal dan peralatan pada masa sekarang ini borjuis bisa diartikan secara lebih luas. Tidak hanya pemilik modal dan mesin, tetapi juga memiliki sumber daya dan penentu kebijakan. Sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, bahan baku, sumber dana dan berbagai hal penting dalam kehidupan. Akan halnya pendidikan, bagi lembaga yang sumber dana utamanya berasal dari pemerintah hal ini jelas menjadi permasalahan sebab besaran dana yang diberikan terbatas. Sebaliknya, kaum proletar sebagai kaum pekerja juga dapat diartikan secara luas, dimana mereka bukan hanya orang-orang yang butuh pekerjaan melainkan juga orang-orang yang membutuhkan sumber daya. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka lembaga pendidikan bisa jadi berada dalam posisi ini. Untuk mendapatkan sejumlah pembiayaan, lembaga pendidikan mesti mengikuti serangkaian aturan dan prosedur yang telah dipersiapkan. Memang prosedur tersebut bertujuan untuk mempermudah, tetapi ada unsur yang luput dipertimbangkan, dimana tidak semua daerah mempunyai akses yang sama.

Dengan demikian, dibutuhkan pula dukungan masyarakat akan pembiayaan pendidikan. hal ini mampu mengubah posisi masyarakat sebagai orang yang membutuhkan jasa pendidikan sekaligus juga sumber dana pendidikan sebuah lembaga. Lebih lanjut lagi, menurut Marx, tekanan biasanya diberikan oleh kelompok dominan terhadap yang tidak dominan. (Sopian, 2020) Sebagai salah satu sumber dana pendidikan, masyarakat ataupun wali murid merasa memiliki dominasi atas lembaga pendidikan. mereka merasa bebas untuk mengatur sistem yang ada, sehingga pada akhirnya mendatangkan efek, pendidikan juga ikut diatur oleh maunya masyarakat bukan berdiri sendiri sebagaimana idealnya sebuah pendidikan.

Di sisi lain terdapat pula permasalahan komersialisasi pendidikan. fenomena ini terjadi sebagai reaksi dari tuntutan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Dimana lembaga pendidikan bersedia menjalankannya sepanjang masyarakat mampu untuk memenuhi besaran dana yang dibutuhkan. (Asmirawati et al., 2016) komersialisasi mengacu kepada pembiayaan perlengkapan pendidikan yang mahal, kepedulian lembaga terhadap besaran biaya tanpa memperhatikan kewajiban pendidikan, serta program pembiayaan yang mahal. Kedua resksi atas bentuk pembiayaan pendidikan ini jelas tidak memberikan efek positif terhadap ketercapaian tujuan pendidikan..

Untuk itu, sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Solihin, 2015), dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendidikan yang dipengaruhi oleh kapitalisme telah menghancurkan tujuan utama pendidikan sebagai usaha mencerdaskan bangsa. Pendidikan yang berorientasi materi dan hedonis memperkuat hasil penelitian analisis pembiayaan pendidikan ini. Dukungan masyarakat bukan semata memandang materi sebagai modal utama melainkan sebagai bentuk dukungan terhadap keberhasilan pendidikan. Penelitian ini akan memberikan dampak terhadap bidang ilmu diantaranya ilmu sosial, ekonomi serta pendidikan. Adapun dampak potensial yang ditimbulkan dari penelitian ini diantaranya, pengkajian peran masyarakat dalam pendidikan, pertimbangan kritis terhadap kebijakan pendidikan serta pemahaman lebih mendalam tentang kesetaraan dalam pendidikan.

## **KESIMPULAN**

Pembiayaan pendidikan di jenjang Taman Kanak-Kanak sebagaimana pembiayaan di jenjang pendidikan lainnya. Ia membutuhkan perencanaan yang baik agar dapat memenuhi kriteria yang ada pada 8 standar pendidikan nasional. Namun demikian, dengan keterbatasan sumberdaya yang ada, maka tidak semua aspek bisa terbiayai oleh dana yang ada. Sehingga mau tidak mau, pendidikan gratis yang dicita-citakan nyatanya masih membutuhkan sokongan dari masyarakat. Kebijakan pemerintah yang ada jelas berpengaruh terhadap dunia pendidikan sebagaimana yang disebutkan oleh Karl Marx. Negara bertanggung jawab membiayai pendidikan warga negaranya. Terkait dengan penggolongan kelas masyarakat menurut pemikiran Marx, hal inilah yang pada akhirnya mewarnai kebijakan pembiayaan pendidikan khususnya di Taman kanak-

kanak. Agar pendidikan berjalan sebagaimana mestinya, setiap unsur yang terlibat dalam pembiayaan pendidikan mestilah memahami betul konsep pembiayaan yang dilakukan. bukan justru pembiayaan yang ada justru menjadi celah agar pendidikan diatur sedemikian rupa menurut keinginan kaum borjuis. Sebab pendidikan tanpa adanya pembiayaan adalah hal yang mustahil.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji kehadirat Tuhan YME, Terima kasih kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu dosen beserta rekan mahasiswa yang telah berkontribusi dalam tulisan ini. Terkhusus kepada operator Taman Kanak-kanak Kecamatan Bukit Sundi, Bendahara sekolah serta TFM Kecamatan yang menjadi responden dalam pengumpulan data penelitian. Semoga tulisan ini memberikan kontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan khususnya Tingkat Taman kanak-kanak. Teristimewa kepada dunsanak di kelas MPI A. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U. C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *Masile =Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59.
- Anwar, M. E. (2014). Menelusuri Kebijakan Pendidikan Islam Di Indonesia. *Edukasi Islami Jurnal Pendidikan Islam*, 03, 483–496.
- Asmirawati, Sulfasyah, & Arifin, J. (2016). Komersialisasi Pendidikan. *Jurnal Equilibrium Jurnal*, Iv(2), 174–183.
- Damayanti, E. (2019). Konsep Dasar Butir Instrumen Penilaian Akreditasi Pendidikan Anak Usia Dini. *Urnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 134–148. <https://doi.org/10.19109/Ra.V3i2.4495>
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/Kanal.V>
- Fip, R. (2010). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. *Jurnal Manajerial*, 9(2), 55–62. <https://doi.org/10.17509/Manajerial.V9i2.1803>
- Hadi, S. (2021). Analisis Model Pembiayaan Dana Bos Dan Bop Pada Lembaga Pendidikan Yang Pernah Diterapkan Di Indonesia. *Tsaqofah*, 1(2), 47–65. <https://doi.org/10.58578/Tsaqofah.V1i2.349>
- Hanani, S. (2017). Keterlibatan Perempuan Dalam Kepemimpinan Publik: Studi Kepemimpinan Ketua Rt Perempuan Di Desa Dendun Kepulauan Riau. *Kafa`Ah: Journal Of Gender Studies*, 7(1), 79. <https://doi.org/10.15548/Jk.V7i1.158>
- Huda, S., Maliki, M., Sadali, I., & Murtafiah, N. H. (2022). Analisis Model-Model Manajemen Pembiayaan Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Lembaga Sekolah. *Unisan Journal: Jurnal Manajemen & Pendidikan Islam*, 01(04), 169–178.
- Kambali, M. (2020). Pemikiran Karl Marx Tentang Struktur Masyarakat. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 8(2), 63–80. <https://doi.org/10.37812/AlIqtishod.V8i2.154>
- Lestari, A., Pratama, L., & Soleh, W. (2022). Perumusan Kebijakan Manajemen Pembiayaan Terpadu Dalam Membangun Budaya Kemandirian Pendidikan Islam Di Pondok Pesantren. *Ad-Dhuha : Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan Budaya Islam*, 3(3), 46–50.
- Mesiono, M., & Roslaeni, R. (2021). Model-Model Pembiayaan Pendidikan (Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Institusi Pendidikan). *Jurnal Bilqolam Pendidikan Islam*, 2(1), 1–18. <https://doi.org/10.51672/Jbpi.V2i1.10>
- Musthafa, L. A.-H. (2017). Model Pembiayaan Pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (Studi Di Madrasah

- 4064 *Analisis Pembiayaan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak menurut Pemikiran Karl Marx – Ulmadevi, Silfia Hanani, Junaidi, Abdillah El-Zakir, Abdurrasyid Ridha*  
DOI : <https://doi.org/10.31004/basicedu.v7i6.6719>
- Aliyah Mu'allimin Mu'allimat Muhammadiyah Garut). *Journal Of Islamic Education*, 2(2), 221–248.
- Oktrigana Wirian, Agustina, N., & Siahaan, A. (2022). Model-Model Pembiayaan Pendidikan. *Educate: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Pengajaran*, 1(1), 44–56.
- Perdana, N. S. (2020). Analisis Biaya Satuan Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Holistik Integratif. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 5(1), 187. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.501>
- Shunhaji, A., N, A. M., & Desniati, P. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor. *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 18–39. <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i1.82>
- Situmeang, R., Pohan, S., & Hadia Lubis, R. (2022). Manajemen Keuangan Sekolah Taman Kanak Kanak Kalam Kudus Sibolga 2022/2023. *Cemerlang, Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Bisnis*, 2(4), 180–190.
- Solihin, M. (2015). Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa). *Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 22, 56–73. <http://ejournal.staiyasnibungo.ac.id/index.php/nurelislam/article/view/22>
- Sonia, N. R. (2022). Strategi Pengembangan Mutu Lembaga Pendidikan Di Era Globalisasi. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(3), 4429–4443. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i3.2961>
- Sopian, A. (2020). Transformasi Sosial Pendidikan. *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 5(1), 116–122. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v5i1.62>
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., Us, K. A., & Menengah, S. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Tho'in, M. (2017). Pembiayaan Pendidikan Melalui Sektor Zakat. *Al-Amwal*, 9(2), 162–175.
- Umanailo, M. C. B. (2019). Pemikiran-Pemikiran Karl Marx. *Social And Behavioral Science*, 1–6.
- Wandra, D., & Hadiyanto, H. (2021). Perencanaan Pembiayaan Pendidikan. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(5), 2898–2904. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v3i5.1005>